

ABSTRAK

Penerapan akses keadilan dalam peradilan di Indonesia memicu banyak perdebatan, khususnya terkait dengan isu perlindungan akses keadilan warga negara. Polemik mengenai isu ini semakin menguat pasca Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor. 38/Pid.B/2019/PN yang memutuskan akses keadilan warga negara tentang tukar guling tanah kas desa dengan hukuman pidana penjara. Penelitian berjudul “Akses Keadilan Dalam Proses Peradilan : Studi Perkara Tukar Guling Tanah Kas Desa”, memiliki dua isu hukum yaitu pengaturan akses keadilan di Indonesia dan penerapan akses keadilan dalam perkara tukar guling tanah kas desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengaturan mengenai *akses keadilan* dalam proses peradilan dimaksudkan untuk memperkuat sistem penegakkan hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Akses keadilan digunakan sebagai prinsip pemenuhan dalam menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-nya dalam mengakses keadilan melalui lembaga - lembaga formal maupun non formal. Pemenuhan akses keadilan masyarakat pada akhirnya membuat penegakkan akses keadilan dalam proses peradilan di Indonesia menghasilkan putusan yang adil dan beradab.

Kata Kunci : Akses Keadilan, Proses Peradilan, Penegakkan Hukum

ABSTRACT

The implementation of access to justice in Indonesian court has led many polemics, especially regarding to the issue of citizen justice access protection. The polemic on this issue has strengthened after the verdict of Ngawi District Court number 38/Pid.B/2019/PN decides citizen justice access about village treasury land ruislag with an imprisonment. The study, entitled “Justice Access in the Judicial Process: Village Treasury Land Ruislag Litigation”, has two legal issues, namely the regulation of access to justice in Indonesia and access to justice in village treasury land ruislag litigation. This study uses case approach, statute approach, and conceptual approach. The regulation regarding justice access in the judicial process is intended to strengthen the law enforcement system in the judicial process in Indonesia. This study concludes the access to justice is used as a fulfillment principle in guaranteeing access for every citizen in order to have the ability to know, understand, realize and use their rights in accessing justice through formal and non-formal institutions. The fulfillment of citizen justice access generates the enforcement of justice access in the judicial process in Indonesia resulting in just and civilized decision.

Keyword: Justice Access, Judicial Process, Law Enforcement